

MEDIA, POLITIK,

dan **Dinamika Sosial** di Era Digital

Buku yang berjudul **Media, Politik, dan Dinamika Sosial di Era Digital**, merupakan kumpulan tulisan dari peserta agenda Seminar Internasional Berbahasa Indonesia (SIBI) yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Kumpulan tulisan ini mengupas fenomena sosial yang beragam, mulai dari keberpihakan media, kebijakan publik, hingga gerakan perempuan. Tentu hadirnya buku ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi publik dalam mengingat kembali, sesuatu hal yang pernah terjadi di masa silam, khususnya dalam merespons fenomena sosial.

Kumpulan tulisan ini dihadirkan tidak hanya sekadar output daripada kegiatan Seminar Internasional, tetapi lebih daripada itu. Bahwa sesungguhnya hadirnya kumpulan tulisan ini memberikan konteks bahwa di masa silam telah terjadi fenomena sosial yang merugikan kesejahteraan masyarakat hingga menciptakan kemiskinan yang struktural. Kondisi inilah yang ingin digambarkan bahwa masa sekarang tidak boleh terulang kembali fenomena sosial yang merugikan.



inteligensiamedia 0811.3083.2044
inteligensiamedia www.inteligensiamedia.com



ISBN: 978-623-381-116-3



9 786233 811163

Inteligencia
Media

MEDIA, POLITIK, dan **Dinamika Sosial** di Era Digital



Pusat Kajian Sosial Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang



MEDIA, POLITIK,

dan **Dinamika Sosial** di Era Digital



Editor: **Ali Roziqin, Hamdan N. Rosyida, Devita Prinanda**

Sugeng Winarno | Budi Suprpto; Erva Mutiara Hati | Ali Roziqin | Gonda Yumitro | Rizki |
Febriani | Sukma Oktaviani | Tutik Sulistyowati | Ahmad Mujahid Arrozy | Nida Atika |
Najamuddin Khairur Rijal | Arianto Rafi Alghifari | Aura Shafira Danayanti | Regita Ayu Cahyani |
Meisyanti | Khina Januar Rahmawati | Chellya Andhita | Rehani Tsabitah Ramadhanisa | Rafi
Indrawan | Ilona Vicenovie Oisina Situmeang | Woro Harkandi Kencana | Dwinastiti Gustira |
Gerry Mirza Dhian | Muhammad Zain | Salsa Yoan Sabrina | Herlin Setio Nugroho | Adiella
Yankie Lubis | Muhammad Aditya Wirawan | Qhazisa Arty Qhalista | Salahudin

*Media, Politik,
dan Dinamika Sosial
di Era Digital*

Media, Politik, dan Dinamika Sosial di Era Digital

Penulis:

Sugeng Winarno	Khina Januar Rahmawati
Budi Suprpto	Chellya Andhita
Erva Mutiara Hati	Rehani Tsabitah Ramadhanisa
Ali Roziqin	Rafi Indrawan
Gonda Yumitro	Ilona Vicenovie Oisina Situmeang
Rizki Febriani	Woro Harkandi Kencana
Sukma Oktaviani	Dwinastiti Gustira
Tutik Sulistyowati	Gerry Mirza Dhian
Ahmad Mujahid Arrozy	Muhammad Zain
Nida Atika	Salsa Yoan Sabrina
Najamuddin Khairur Rijal	Herlin Setio Nugroho
Arianto Rafi Alghifari	Adiella Yankie Lubis
Aura Shafira Danayanti	Muhammad Aditya Wirawan
Regita Ayu Cahyani	Qhazisa Arty Qhalista
Meisyanti	Salahudin

Editor:

Ali Roziqin, Hamdan N. Rosyida, Devita Prinanda

INTELIGENSIA MEDIA

2023

Media, Politik, dan Dinamika Sosial di Era Digital

Penulis:

Sugeng Winarno; Budi Suprpto; Erva Mutiara Hati; Ali Roziqin; Gonda Yumitro; Rizki Febriani; Sukma Oktaviani; Tutik Sulistyowati; Ahmad Mujahid Arrozy; Nida Atika; Najamuddin Khairur Rijal; Arianto Rafi Alghifari; Aura Shafira Danayanti; Regita Ayu Cahyani; Meisyanti; Khina Januar Rahmawati; Chellya Andhita; Rehani Tsabitah Ramadhanisa; Rafi Indrawan; Ilona Vicenovie Oisina Situmeang; Woro Harkandi Kencana; Dwinastiti Gustira; Gerry Mirza Dhian; Muhammad Zain; Salsa Yoan Sabrina; Herlin Setio Nugroho; Adiella Yankie Lubis; Muhammad Aditya Wirawan; Qhazisa Arty Qhalista; Salahudin

Editor:

Ali Roziqin; Hamdan N. Rosyida; Devita Prinanda

Desain sampul: Dana Ari Tata letak: Kamilia Sukmawati

ISBN : 978-623-381-116-3

Copyright © Februari, 2023

Diterbitkan oleh:

Inteligensia Media (Intrans Publishing Group)

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email: inteligensiamedia@gmail.com

Website: inteligensiamedia.com

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sugeng Winarno; Budi Suprpto; Erva Mutiara Hati; Ali Roziqin; Gonda Yumitro; Rizki Febriani; Sukma Oktaviani; Tutik Sulistyowati; Ahmad Mujahid Arrozy; Nida Atika; Najamuddin Khairur Rijal; Arianto Rafi Alghifari; Aura Shafira Danayanti; Regita Ayu Cahyani; Meisyanti; Khina Januar Rahmawati; Chellya Andhita; Rehani Tsabitah Ramadhanisa; Rafi Indrawan; Ilona Vicenovie Oisina Situmeang; Woro Harkandi Kencana; Dwinastiti Gustira; Gerry Mirza Dhian; Muhammad Zain; Salsa Yoan Sabrina; Herlin Setio Nugroho; Adiella Yankie Lubis; Muhammad Aditya Wirawan; Qhazisa Arty Qhalista; Salahudin

Media, Politik, dan Dinamika Sosial di Era Digital

Cet. 1.—Malang: Inteligensia Media, 2023; xiv+244 hlm; 15,5cm x 23cm

1. Media Komunikasi, Media Massa — I. Judul II. Perpustakaan Nasional

302.23

Didistribusikan oleh

PT. Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

Jl. Joyosuko Agung 86 Malang

Telp. 0341-5080245

Email: bikara86@gmail.com

Pengantar

Dekan FISIP UMM

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga *book chapter* kegiatan Seminar Internasional Berbahasa Indonesia (SIBI) mengambil topik **Media, Politik, dan Dinamika Sosial di Era Digital**, yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 23-24 November 2022 dapat terwujud.

Book chapter ini berisikan gagasan dan pemikiran dari para presenter di antaranya dosen dan mahasiswa FISIP UMM untuk memberikan telaah kritis yang konstruktif terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan di tengah masyarakat digital dalam perspektif ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Kegiatan ini telah diikuti dari berbagai institusi pendidikan tinggi baik dari mahasiswa maupun dosen.

Book chapter ini merupakan salah satu sumbangsih FISIP UMM terhadap dinamika sosial yang mengalami turbulensi akibat dari globalisasi, disrupsi dan pandemi Covid-19. Gagasan yang disampaikan dalam beberapa *chapter* dalam buku ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan bagi pembuat kebijakan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat tiga, sebagaimana yang dijelaskan di muka.

Akhirnya, kami mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan *book chapter* ini. Semoga *book chapter* ini dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis dan kepentingan praktis.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 28 Januari 2023

Dekan FISIP UMM

Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si

Pengantar Editor

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga proses penerbitan *book chapter* ini dapat berjalan dengan lancar. *Book Chapter* ini diberi judul 'Media, Politik, dan Dinamika Sosial di Era Digital', sesuai dengan pergerakan manusia dan teknologi menuju Revolusi Industri 5.0 yang ternyata berdampak di seluruh aspek kehidupan.

Dalam satu dekade terakhir, perkembangan *new media* meningkat pesat sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Penggunaan media sudah tidak sebatas alat komunikasi saja, namun lebih praktikal sebagai komunikator dalam beraktivitas sehari-hari. Melalui *new media*, proses pencarian informasi dapat lebih cepat, pemenuhan kebutuhan primer hingga tersier dapat diperoleh melalui aplikasi daring, dan yang paling utama adalah efisiensi dalam penggunaan tenaga dan waktu, sehingga dapat melakukan pekerjaan *multitasking*. Maka, wajar apabila manusia selalu terhubung dengan gawai agar tetap produktif di era digital ini.

Dalam kesehariannya, kesadaran masyarakat akan optimalisasi *new media* meningkat, berbanding lurus dengan output yang dihasilkan. Dalam ranah sosial, *new media* bernilai hegemon untuk menggerakkan masyarakat agar mematuhi konsensus produk budaya yang berlaku. Dalam ranah politik, *new media* mampu melakukan

penggiringan opini yang sesuai diharapkan kreator maupun *stakeholder*, *branding* imaji positif, menyebarkan informasi *hoax* maupun *hate speech* dalam rangka pembunuhan karakter figur publik tertentu, bahkan mendekonstruksi serta mengkonstruksi ulang kebenaran. *New media* menyajikan beragam berita, menyerahkan kepada masyarakat untuk memilih berita yang dianggap benar, sehingga masyarakat dapat memilih kebenaran yang subjektif dan abai akan kebenaran objektif (*post-truth*). Perlu adanya literasi sebagai filter dalam menyaring informasi palsu, serta kerja sama dari akademisi dan masyarakat dalam memanfaatkan media untuk mencerahkan kehidupan.

Pada dasarnya, buku ini merupakan kumpulan tulisan dari *civitas academica* dengan berbagai latar belakang akademik dan juga program studi, namun tetap berada di bawah rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan juga humaniora. *Book chapter* ini merupakan salah satu upaya dari upaya peneliti dalam memanfaatkan teknologi agar lebih efisien dalam pekerjaannya. Dari yang paling sederhana, kita menggunakan internet untuk mencari data primer maupun sekunder dalam penulisan artikel ilmiah, penggunaan *software* dalam pemetaan tema yang merupakan pengembangan dari judul, alternatif metode penelitian berbasis jaringan, penulisan daftar referensi otomatis maupun sitasi, hingga pencarian tren penelitian yang muncul pada saat ini.

Kriteria seleksi tulisan ini cukup ketat, dengan mempertimbangkan kerunutan sistematika, kesesuaian konten dengan tema besar, kedalaman analisis, serta *research gap* dan keterbaruan (*novelty*) yang sesuai dengan tema. Meskipun demikian, proses revisi tetap berjalan untuk meningkatkan kualitas artikel ilmiah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian lainnya. Melalui proses yang panjang, *book chapter* ini menunjukkan adanya semangat berkemajuan dalam menggunakan teknologi di bidang ilmiah. Pemanfaatan teknologi dalam penulisan karya ilmiah perlu kita rangkul sebagai partner dalam menyederhanakan kode-kode rumit dari algoritma tema penelitian, yang nantinya membantu memetakan cluster penelitian di ranah sosial-politik di masa depan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah bekerja sama dan berkolaborasi untuk meningkatkan literasi melalui *book chapter* ini. Kami selaku Tim Editor memohon maaf atas kekurangan substansi dari *book chapter* ini dan bersedia

menerima masukan dari para pembaca. Besar harapan kami, buku ini dapat mencerahkan dan menginspirasi para *civitas academica* pada khususnya, serta masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 6 Februari 2023

Tim Editor

Pengantar Penerbit

Buku yang berjudul **Media, Politik, dan Dinamika Sosial di Era Digital**, merupakan kumpulan tulisan dari peserta agenda Seminar Internasional Berbahasa Indonesia (SIBI) yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Kumpulan tulisan ini mengupas fenomena sosial yang beragam, mulai dari keberpihakan media, kebijakan publik, hingga gerakan perempuan. Tentu hadirnya buku ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi publik dalam mengingat kembali, sesuatu hal yang pernah terjadi di masa silam, khususnya dalam merespons fenomena sosial.

Kumpulan tulisan ini dihadirkan tidak hanya sekadar *output* daripada kegiatan Seminar Internasional, tetapi lebih daripada itu. Bahwa sesungguhnya hadirnya kumpulan tulisan ini memberikan konteks bahwa di masa silam telah terjadi fenomena sosial yang merugikan kesejahteraan masyarakat hingga menciptakan kemiskinan yang struktural. Kondisi inilah yang ingin digambarkan bahwa masa sekarang tidak boleh terulang kembali fenomena sosial yang merugikan.

Buku ini hadir kaya dengan perseptif, karena ditulis oleh orang-orang yang serius dan paham perihal fenomena sosial. Buku ini terdiri dari 13 tulisan yang merekam sekitar tujuh tema, di antaranya media, inovasi pelayanan publik, gerakan perempuan, masyarakat adat, tindak pidana korupsi, terorisme, dan pemikiran seseorang. Selain itu, menariknya dalam buku ini pembaca diajak untuk terlibat dalam diskursus tentang inovasi pelayanan publik melalui inovasi pemerintahan yang telah dijabarkan beberapa penulis,

seperti judul tulisan **Pemanfaatan Platform Digital dalam Mewujudkan Smart Village di Pemerintahan Desa Rawa Urip, Kabupaten Cirebon dan Implementasi Aplikasi Smart Government di Desa Ambulu, Kabupaten Cirebon.**

Tidak hanya menggambarkan inovasi pelayanan publik saja, tetapi kumpulan tulisan ini juga menuliskan kekalutan perihal media yang semakin hari semakin terkontrol oleh segelintiran orang. Tentu posisi tersebut menjadikan media mengaburkan fungsi utama, yaitu keberpihakan kepada masyarakat dalam mengungkapkan pemberitaan yang fakual. Fenomena tersebut tidak lain dari adanya kemesraan yang luar biasa antara media dan politik sehingga melahirkan simbiosis mutualisme bagi segelintiran orang dan simbiosis parasitisme bagi masyarakat yang setiap hari disuguhi pemberitaan yang tak faktual. Hal tersebut telah dikupas dengan begitu detail dan baik dalam tulisan yang berjudul **Media dan Politik Citra Diri dan Oligopoli Media, Oligarki Politik, dan Kemerosotan Demokrasi di Indonesia.**

Selain itu, buku ini juga semakin apik tatkala menghadirkan tulisan yang menarasikan pemberdayaan perempuan basis kearifan lokal serta perjuangan tokoh perempuan yang luar biasa dalam melakukan perubahan sosial. Dengan demikian, buku ini sangat berguna sekali sebagai panduan untuk pemberdayaan perempuan dan perubahan sosial.

Daftar Isi

Pengantar Dekan FISIP UMM __ v

Pengantar Editor __ vii

Pengantar Penerbit __ xi

Daftar Isi __ xiii

- Media dan Politik Citra Diri __ 1
- Oligopoli Media, Oligarki Politik, dan Kemosrotan Demokrasi di Indonesia __ 25
- Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Kios E-PAKLADI (Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan __ 45
- Model Perkembangan Terorisme di Jawa Timur: Perspektif Sosial dan Ekonomi __ 69
- Pemberdayaan Perempuan Berbasis *Indigenous People* __ 85
- Diskursus Masyarakat Adat (*Indigenous People*) dalam Pemetaan *Cultural Periphery* __ 111
- Gerakan Perempuan dan Perubahan Kebijakan: Kasus Larangan Mengemudi Bagi Perempuan di Arab Saudi __ 135
- Analisis Faktor Budaya dalam Mewujudkan *Smart Society* di Desa Lebak Mekar __ 149
- Implementasi Aplikasi *Smart Government* di Desa Ambulu, Kabupaten Cirebon __ 185

- Pemanfaatan Platform Digital dalam Mewujudkan *Smart Village* di Pemerintahan Desa Rawa Urip, Kabupaten Cirebon __ 177
- Praktik Korupsi Jual Beli Jabatan oleh Mantan Bupati Jombang __ 189
- Analisis Data Putusan MA Tindak Pidana Korupsi Idrus Marham di Jakarta __ 209
- *Review* Pemikiran “*Baogang He*” tentang *Participatory Budgeting* __ 225

Tentang Penulis __ 241

GERAKAN PEREMPUAN DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN: KASUS LARANGAN MENGEMUDI BAGI PEREMPUAN ARAB SAUDI

Nida Atika & Najamuddin Khairur Rijal

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang*

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai perjuangan gerakan dan aktivis perempuan dalam menuntut penghapusan kebijakan larangan mengemudi bagi perempuan di Arab Saudi. Perjuangan yang telah berlangsung sejak 1990 tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan internet dan berbagai instrumen media sosial. Perjuangan aktivis perempuan selama hampir tiga dekade akhirnya berhasil setelah pemerintah kerajaan Arab Saudi menghapuskan kebijakan larangan mengemudi bagi perempuan yang telah berlaku sejak 1957. Keberhasilan gerakan perempuan ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk merebut perubahan bukanlah proses yang instan. Oleh karena itu, membutuhkan berbagai cara dan instrumen, serta memerlukan dukungan dan keterlibatan bersama.

Kata Kunci: *Gerakan Perempuan, Larangan Mengemudi, dan Perubahan Kebijakan.*

A. Pendahuluan

Tulisan ini membahas mengenai perjuangan gerakan dan aktivis perempuan dalam menuntut penghapusan kebijakan larangan mengemudi bagi perempuan di Arab Saudi. Kebijakan larangan

mengemudi bagi perempuan ditetapkan pada 1957 oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Kebijakan tersebut diberlakukan atas dasar menghindari kerusakan dalam masyarakat dan penyimpangan terhadap syariat Islam, terutama pada perempuan. Sebagaimana dipahami, kerajaan Arab Saudi merupakan negara di Semenanjung Arab dengan sistem pemerintahan menggunakan hukum syariat Islam. Pada 1992, Arab Saudi menetapkan *Basic of Law Governance* atau Hukum Dasar Pemerintahan untuk mengatur sistem pemerintahannya, serta mengatur hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah (Mubarok, 2017).

Kebijakan larangan mengemudi bagi perempuan didasarkan dua hal penting dalam Islam. Pertama, *ma yufdhi ila al-haram fahuwa muharram* (segala perbuatan yang mengarahkan seseorang kepada hal-hal yang haram, maka hukumnya adalah haram). Kedua, *dar al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menghindari mudarat atau hal-hal yang merugikan lebih dikedepankan daripada mencari manfaat) (Nashrullah, 2013). Dengan dasar itu, maka perempuan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki, termasuk dalam hal mengemudi.

Meskipun tidak ada hukum tertulis mengenai kebijakan tersebut, warga Arab Saudi memiliki kewajiban untuk mematuhi kebijakan tersebut. Hal ini didasarkan pada *Basic of Law Governance* Bab 3 Pasal 9, dijelaskan bahwa setiap warga memiliki kewajiban untuk setia dan taat kepada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh raja (The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia, n.d.). Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, sebagai Dewan Senior Ulama, yang menyatakan bahwa kebijakan larangan mengemudi tersebut ditetapkan untuk menghindari kemungkinan perempuan untuk tidak menutup aurat saat bepergian, berkendara dengan yang bukan mahramnya. Serta muncul sikap membangkang pada orang tua atau suami jika diberi kebebasan mengemudi. Selain itu, juga untuk menghindari angka kecelakaan lalu lintas pada perempuan (Zuhri, 2013).

Namun demikian, dalam pandangan masyarakat internasional, kebijakan tersebut menunjukkan stereotip pada perempuan. Hal ini dinilai kian memperparah kondisi pemenuhan hak-hak perempuan. Apalagi *Global Gender Gap Report* tahun 2011 menunjukkan bahwa perempuan di Arab Saudi juga tertinggal dalam partisipasi di

bidang ekonomi dan pemberdayaan politik, meskipun syarat yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan mereka telah mencapai kriteria yang mencukupi (Hausmann et al., 2011).

Arab Saudi memiliki indeks kesenjangan gender yang sangat tinggi. Perempuan dewasa tidak diperlakukan sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Tidak hanya itu, harus mendapatkan izin dari laki-laki untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, bahkan untuk keluar rumah sekalipun. Selain itu, perempuan dan laki-laki juga dipisahkan secara ketat dalam kegiatan publik (Al-Rasheed, 2013).

Lebih lanjut, kebijakan larangan mengemudi yang telah diimplementasikan selama puluhan tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai aktivis perempuan. Tulisan ini berusaha memaparkan berbagai upaya aktivis dan gerakan perempuan dalam menuntut pencabutan kebijakan larangan mengemudi. Tulisan ini dibagi ke dalam beberapa subbahasan di antaranya sebagai berikut.

Pertama, merupakan bagian pendahuluan untuk menunjukkan fokus dan persoalan yang dibahas. Kedua, membahas mengenai alasan mengapa kebijakan larangan mengemudi bagi perempuan digugat atau ditolak. Ketiga, membahas mengenai berbagai upaya yang dilakukan sebagai bentuk penolakan dan tuntutan atas penghapusan kebijakan larangan mengemudi. Keempat, capaian dari tuntutan penolakan terhadap kebijakan larangan mengemudi hingga pemerintah Arab Saudi menghapuskan kebijakan tersebut. Kelima adalah diskusi berdasar temuan atau catatan penting dari perjuangan perempuan di Arab Saudi. Terakhir adalah bagian penutup yang menawarkan perlunya kajian lebih lanjut tentang topik kajian ini.

B. Pembahasan

1. Gugatan terhadap Kebijakan Larangan Mengemudi bagi Perempuan

Kebijakan larangan mengemudi bagi perempuan telah melalui sejarah panjang protes dan penolakan sejak dekade 1990-an. Protes terkait tuntutan pencabutan larangan mengemudi didasari oleh beberapa alasan. Pertama, karena faktor pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan. Sejak 1940-an, keluarga yang memiliki kekayaan terhadap minyak menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Kemudian, pada 1960-an, pemerintah mengeluarkan program untuk mendanai pendidikan warga negaranya. Perempuan yang

berpendidikan biasanya memiliki kemampuan untuk mendidik anak-anak mereka, bergabung dengan angkatan kerja, memahami hak-hak mereka, dan memiliki sedikit anak, hal tersebut mengarah ke konsekuensi ekonomi dan sosial yang berbeda (United Nations Population Fund, 2019).

Kemudian, pada 1980-an, Raja Fahd memulai proses "*saudization*," yakni proses untuk mengurangi ketergantungan kepada pekerja asing, dengan membuka peluang bagi perempuan untuk bekerja, yang kebanyakan berada di sektor pengajaran, perkantoran, bank, dan kesehatan. Peluang seperti itu dianggap mendorong perempuan berpendidikan untuk bertanggung jawab secara finansial dan meraih keberhasilan individu. Mereka beranggapan bahwa, masyarakat konservatif di Arab Saudi perlu diubah. Jika mereka mendapat kesempatan untuk bekerja ke bidang yang lebih tinggi dan mengenyam pendidikan yang tinggi juga. Selain itu, seharusnya mereka juga diberi kesempatan untuk mendapatkan haknya dalam mengemudi (United Nations Population Fund, 2019).

Kedua, sebagian besar perempuan di Arab Saudi memiliki pekerjaan. Mereka mengklaim bahwa membayar seorang sopir untuk sehari-hari mengurangi pendapatan rumah tangga mereka. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa, tidak perlu, dan tidak nyaman bila menyewa seseorang untuk mengendarai kendaraan. Sedangkan, mereka memiliki kemampuan untuk mengendarai kendaraannya sendiri. Perempuan dari keluarga menengah ke bawah, sering melontarkan alasan masalah perekonomian terkait kebijakan tersebut. Sebab, mereka tidak mampu membayar seorang sopir, maka mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Sehingga semakin memperburuk situasi keuangan keluarga mereka. Sedangkan wali laki-laki tidak mampu setiap saat mengantar perempuan, karena mereka juga memiliki pekerjaan sendiri.

Ketiga, kebijakan tersebut bertentangan dengan pendirian agama terhadap perempuan. Mereka beranggapan bahwa, kebijakan tersebut hanya untuk memuaskan budaya Islam Konservatif yang ada di Arab Saudi. Menurutnya, budaya Islam konservatif menganggap bahwa perempuan yang diberi izin untuk mengemudi akan menyebabkan penurunan moral negara. Para perempuan tidak boleh ditinggalkan seorang diri bersama laki-laki yang bukan kerabatnya. Pada nyatanya, di antara mereka dibiarkan bepergian

seorang diri dengan sopirnya, bahkan ada yang mendapatkan pelecehan dari sopir-sopir yang mereka sewa.

2. Upaya Menolak Kebijakan Larangan Mengemudi

Kebijakan larangan mengemudi bagi perempuan mendapat penentangan dari berbagai aktivis perempuan, baik dengan aksi turun ke jalan maupun melalui media. Dimulai pada 1990, sekitar lebih dari 40 perempuan di Arab Saudi mulai memberanikan diri untuk berkampanye menyuarakan haknya dengan mengendarai mobil seorang diri di jalan raya di Riyadh. Aksi tersebut merupakan protes pertama kali dari perempuan dalam menuntut kesetaraan dalam hal mengemudi (Nasr, 2011). Kemudian, pada bulan Agustus 2007, aktivis perempuan yang bernama Wajeha al-Huwaider menginisiasi petisi penolakan kebijakan larangan mengemudi kepada Raja Abdullah. Selain itu, ia juga menjadi pelopor aktivis perempuan lainnya untuk melakukan aksi nekat mengendarai kendaraan seorang diri dan merekam aksi protes tersebut saat *International Women's Day* pada 2008.

Aksi tersebut menjadi *booming* dan mendapat perhatian masyarakat Arab Saudi maupun internasional. Dalam aksinya, Wajeha Al-Huwaider juga menjadi pelopor aktivis-aktivis perempuan lainnya untuk melakukan aksi protes berupa video mengemudi dan penyebaran video tersebut melalui media sosial. Namun, meski telah mendapat dukungan dari warga lokal maupun Internasional. Aksi tersebut masih belum berhasil membawa perubahan dalam pencabutan kebijakan larangan mengemudi bagi kaum perempuan pada saat itu (MEMRI, 2007).

Kemudian, empat tahun setelah aksi yang dilakukan oleh Wajeha Al-Huwaider, aksi protes turun ke jalan berikutnya terjadi di 2011. Aksi ini diawali dengan kampanye di media sosial Facebook dengan judul "*Teach Me How to Drive so I Can Protect Myself*" atau dikenal sebagai kampanye "*Women 2 Drive*." *Women 2 Drive* tersebut terinspirasi dari kampanye Wajeha Al-Huwaider sebelumnya. Kampanye ini dilaksanakan pada bulan Juni 2011, yang salah satu pemimpinya adalah aktivis terkemuka di Arab Saudi, yakni Manal al-Sharif. Manal al-Sharif adalah aktivis sekaligus sebagai *IT security engineer* di Arab Saudi. Tujuan dari kampanye tersebut adalah untuk mengajak seluruh perempuan di Arab Saudi untuk

turun ke jalan dan menuntut pencabutan kebijakan larangan mengemudi (Agarwal et al., 2012; Rijal & Khoirina, 2019).

Sebelumnya, pada Mei 2011, Manal al-Sharif bersama dengan Wajeha Al-Huwaider membuat video mengendarai mobil dan kemudian diunggah ke YouTube. Dalam video yang berdurasi 8 menit 40 detik tersebut, Manal mengatakan bahwa tidak semua keluarga di Arab Saudi mampu untuk menanggung biaya untuk menyewa sopir pribadi. Peralnya, biaya untuk menyewa sopir adalah 800 riyal hingga 1200 riyal atau sekitar \$200 hingga \$300 per bulannya. Bagi kalangan keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah tentu saja hal tersebut menjadi salah satu hal yang dianggap memberatkan (Agarwal et al., 2012). Selain alasan materi, menyewa sopir pribadi tidak menutup kemungkinan untuk perempuan mendapatkan pelecehan seksual, baik secara verbal maupun fisik. Inti dari video tersebut adalah, mereka ingin menyampaikan bahwa dicabutnya kebijakan larangan mengemudi akan membawa kebaikan bagi seluruh perempuan di Arab Saudi.

Saat mengemudi ini, mereka diberhentikan oleh polisi di kota Al-Khobar di provinsi Timur Arab Saudi. Setelah diinterogasi selama enam jam, mereka dilepaskan. Namun kemudian, keesokan harinya Manal al-Sharif kembali ditangkap oleh pihak kepolisian atas menyebarnya video yang diunggah di media sosial (Agarwal et al., 2012). Atas kasus penangkapan Manal al-Sharif, sejumlah aktivis perempuan di Arab Saudi membuat aksi-aksi pembelaan untuk membebaskan Manal melalui pengadaan beberapa petisi. Pertama adalah petisi dengan judul "*Release Saudi Woman Arrested for Simply Driving a Car,*" yang telah mendapat sebanyak 3.540 tanda tangan. Petisi tersebut dimulai oleh akun bernama *Saudi Women for Driving* بالقيادة يطالبن سعوديات, yang ditujukan kepada raja Abdullah, Menteri Kehakiman Arab Saudi, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Menteri Kebudayaan dan Informasi Arab Saudi, dan Kementerian Keadilan Arab Saudi (Amnesty International, 2011).

Setelah peristiwa penangkapan Manal al-Sharif, sebulan kemudian lima orang perempuan ditangkap karena mengemudi. Mereka mengaku terinspirasi dari aksi Manal al-Sharif yang berani berkendara di balik kemudi. Atas kasus ini, para perempuan kembali membuat pembelaan dengan membuat petisi dengan judul "*Free Saudi Women Drivers Immediately!*" Petisi tersebut telah mendapat

sebanyak 77.374 tanda tangan. Petisi tersebut juga dimulai oleh akun *Saudi Women for Driving* بالقيادة يطالبن سعوديات (Change.org, 2011).

Lebih lanjut, internet dengan berbagai fiturnya menjadi elemen penting dalam berbagai aksi penolakan terhadap kebijakan larangan mengemudi bagi perempuan. Berbagai aktivis dan gerakan perempuan memanfaatkan instrumen internet, melalui beragam media sosial, blog, situs, dan lainnya dalam memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan. Beberapa aktivis perempuan tersebut seperti Nouf Abdulaziz, Eman Al-Nafjan, Manal Al-Sharif, Azizia al-Yousef, serta Loujain Al-Hathlout.

Nouf Abdulaziz, seorang jurnalis, *blogger* dan aktivis pejuang hak asasi manusia yang memiliki *blog* dengan nama *noofah.com*. Selain menulis *blog*, ia juga menulis untuk situs web feminis *The Arab Noon* (Committee to Project Journalists, 2018). Namun, Nouf Abdulaziz telah dipaksa untuk berhenti menulis *blog*-nya karena tekanan dari pihak yang berwenang, namun tidak diketahui siapa yang melakukan tindakan tersebut. Terbukti dengan *blog*-nya yang sudah tidak bisa diakses. Atas dukungan-dukungannya terhadap pencabutan larangan mengemudi, ia menerima beberapa peringatan sejak 2016 dari Kementerian Dalam Negeri, yang mengaku memantau tindakannya selama ini. Akhirnya ditangkap pada 6 Juni 2018 (PEN America, 2019).

Selain itu, Manal Al-Sharif mengadakan kampanye yang bernama *The Freedom Drive*, sebagai seruan kepada seluruh perempuan dan laki-laki di seluruh dunia untuk berdiri guna mengakhiri sistem hukum perwalian laki-laki dan segera membebaskan para aktivis yang dipenjara karena sikap kritisnya. Ia mengajak untuk melakukan aksi pembelaan dengan menandatangani petisi dan membagikan kampanye tersebut dengan tagar *#IDrive4Freedom*. Orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam kampanye tersebut dapat menandatangani petisi di situs web *www.thefreedomdrive.com*.

Lebih dari itu, seorang *blogger* terkenal bernama Eman al-Nafjan melakukan kampanye *October 26th Women Driving Campaign*. Sama seperti aksi-aksi sebelumnya, kampanye tersebut dilakukan dengan cara turun ke jalan, untuk menentang kebijakan terhadap perempuan terkait larangan mengemudi melalui jejaring sosial *online* (Usher, 2013). Menurut Eman al-Nafjan, kampanye tersebut dimaksudkan

untuk menjadi gerakan atau wadah yang terbuka untuk semua orang Arab Saudi, baik untuk laki-laki maupun perempuan, untuk mengajak dan menunjukkan dukungan mereka. Pada saat kampanye berlangsung, banyak dari Warga Negara Arab Saudi memberikan dukungan publik mereka dengan mengunggah beberapa video atau gambar dengan menandai akun *Instagram @oct26driving* (Usher, 2013).

Adapula Loujain Al-Hathlout yang berkendara seorang diri dari Uni Emirat Arab (UEA) menuju Arab Saudi. Ia memiliki surat izin mengemudi yang berlaku di enam negara yang bekerja sama dalam *Gulf Cooperation Council*, yakni *Uni Emirat Arab*, Arab Saudi, Qatar, Oman, Kuwait dan Bahrain. Saat berkendara, ia merekam dirinya dan mengunggahnya ke *YouTube*. Dalam videonya, Loujain mengatakan tujuannya, bahwa ia ingin melanjutkan kampanye perempuan mengemudi yang selama ini belum mendapatkan hasil yang signifikan (Mackey, 2014).

Namun, tujuan dari aksi yang dilakukan Loujain al-Hathloul harus berhenti di tengah jalan, karena ia diberhentikan oleh polisi di perbatasan meskipun ia telah menunjukkan izin mengemudi didapatkannya dari UAE. Ia kemudian mendapatkan hukuman penjara 70 hari. Dirinya didakwa memperburuk citra Arab Saudi karena videonya tersebar ke dunia internasional (Mackey, 2014).

Aksi yang dilakukan Loujain al-Hathloul dapat dikatakan membuka peluang yang baik untuk perjuangan aktivis-aktivis perempuan. Meskipun dampaknya belum terlihat, namun aksi tersebut mendapat respons dari anggota pemerintahan. Dewan penasihat raja merekomendasikan agar pemerintah mencabut larangan mengemudi pada perempuan, dengan syarat hanya berlaku untuk perempuan yang berusia di atas 30 tahun, tidak boleh berada di jalan raya di atas pukul 8 malam, tidak diizinkan memakai *make-up* saat mengemudi dan tetap harus dengan sepengetahuan wali laki-laki. Namun, rekomendasi tersebut tidak diterima dan dilaksanakan kerajaan (Mackey, 2014).

Kemudian terdapat kampanye *My Right to Dignity* yang diinisiasi aktivis perempuan Azizia al-Yousef. Kampanye tersebut bernama "*I Am My Own Guardian*." Kampanye ini pada dasarnya dibentuk untuk mengakhiri sistem hukum perwalian laki-laki di Arab Saudi (Nora Doajji, 2017). Selain itu, mengekspos tindakan diskriminasi pada hak perempuan, kampanye *I Am My Own Guardian* ini menegaskan

tiga poin penting yang diharapkan untuk diubah, yakni sistem perwalian laki-laki, mencabut larangan mengemudi bagi kaum perempuan, dan mengakui hak-hak asasi untuk perempuan. Selain tiga poin penting tersebut, kampanye ini juga untuk menuntut hak dalam melakukan perjalanan, menikah, membuka rekening bank, keluar dari penjara, mengakses layanan kesehatan serta hal-hal lain yang umum untuk masyarakat sipil (Buisson, 2016).

Selain itu, Aziza al-Yousef membuat petisi yang selanjutnya hasilnya dikirimkan ke pengadilan kerajaan, namun tidak mendapat tanggapan. Tidak hanya itu, sebanyak 2.500 perempuan Arab Saudi juga mengirimkan telegram ke kantor raja Arab Saudi, yang isinya adalah permohonan untuk mengakhiri sistem perwalian laki-laki. Dalam menanggapi kasus ini, tokoh Islam tertinggi di Arab Saudi, Mufti, mengklaim perlawanan dan penuntutan penghapusan sistem perwalian sebagai tindak kejahatan terhadap Islam. Namun, di sisi lain, beberapa tokoh agama mendukung dihapuskannya sistem perwalian laki-laki, karena dalam sistem tersebut tidak memiliki landasan dalam hukum Islam. Pada 30 November 2016, Pangeran Alwaleed Bin Talal, memposting di *Twitter* tentang dukungan dicabutnya larangan mengemudi bagi perempuan di Arab Saudi. Menurutnya, melarang perempuan mengemudi sama saja dengan menghambat hak-hak perempuan (Farber, 2016).

3. Perubahan Kebijakan Larangan Mengemudi

Pada 26 September 2017, Raja Salman mengeluarkan dekrit kerajaan untuk menambahkan ketentuan baru pada Dekrit Kerajaan M/85 tentang Lalu Lintas. Dekrit baru tersebut memberikan perempuan hak untuk membuat surat izin mengemudinya sendiri. Keputusan tersebut adalah instrumen hukum pertama dalam sejarah Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan hak mengemudi bagi kaum perempuan. Dekrit tersebut berjudul *"Royal Order to Adopt the Provisions of the Traffic Law and Its Executive Regulation, Including the Issuance of Driving Licenses for Males and Females Alike."* Dalam dekrit tersebut dijelaskan bahwa, Kerajaan akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Arab Saudi (Sadek, 2017).

Pernyataan langsung terkait dicabutnya kebijakan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdallah

al-Mouallimi dalam sidang Majelis Umum PBB. Pernyataan tersebut berbunyi, *"You maybe interested to know, there a few minutes ago, a royal decree has been issued in Saudi Arabia, giving women try to drive. This in a historic day, for Saudi society, for men and women, and we can now say at last."* Selanjutnya, pelaksanaan pencabutan kebijakan larangan mengemudi bagi kaum perempuan di Arab Saudi tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018 (BBC, 2018).

Pernyataan tersebut merupakan suatu pencapaian besar bagi perempuan di Arab Saudi yang sudah berjuang memperjuangkan haknya dalam mengemudi selama puluhan tahun sejak dilakukan aksi protes pertama kali pada 1990. Pencabutan kebijakan larangan mengemudi tersebut merupakan bagian dari program Putra Mahkota Mohammed bin Salman, untuk memodernisasi beberapa aspek masyarakat Arab Saudi. Keinginan Putra Mahkota Arab Saudi tersebut didasari oleh reformasi sosial-ekonomi yang dikenal dengan Visi Saudi 2030 yang dibuat pada tahun 2016, dengan cara mengurangi ketergantungan pendapatan Arab Saudi dari sektor minyak bumi, dan lebih mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti dalam bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan pariwisata (BBC, 2017). Oleh karena itu, untuk mencapai visi tersebut, Pangeran Mohammed bin Salman sangat mendukung dihapuskannya larangan mengemudi bagi perempuan, mengingat bahwa dengan berakhirnya larangan mengemudi akan memungkinkan lebih banyak perempuan untuk bergabung dengan angkatan kerja (Derhally & Khan, 2017).

4. Diskusi: Pelajaran dari Arab Saudi

Berdasarkan paparan di atas, beberapa poin penting yang menjadi catatan dan diskusi antara lain adalah, pertama, keberhasilan gerakan perempuan menuntut penghapusan kebijakan larangan mengemudi bagi perempuan merupakan sebuah upaya panjang. Keberhasilan tersebut bukan sebuah proses singkat melainkan perjuangan *long lasting* yang telah dimulai sejak 1990. Berdasar fakta di atas, dapat dipahami bahwa kesuksesan sebuah gerakan masyarakat dalam menuntut perubahan membutuhkan *durability*, kemampuan bertahan dalam durasi waktu yang panjang atau lama (Rijal & Anggraheni, 2019; Rijal & Khoirina, 2019). Perubahan itu bukanlah sebuah proses instan melainkan merupakan akumulasi dari serangkaian proses perjuangan tak berkesudahan.

Kedua, dalam konteks *durability* di atas, perjuangan perempuan di Arab Saudi dalam menuntut pencabutan kebijakan larangan mengemudi terus digaungkan dari tahun ke tahun. Berawal dari beberapa perempuan kemudian menginspirasi perempuan lain hingga berkembang menjadi aksi kolektif yang selanjutnya men-dorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk laki-laki, dengan berbagai latar belakang sosio-kultural. Berdasar fakta ini, dapat dikatakan bahwa sebuah perjuangan dalam mendorong perubahan kebijakan membutuhkan kesadaran (*awareness*) dan keterlibatan (*engagement*) banyak pihak (Rijal & Widiatmojo, 2021). Tujuan untuk membangun kesadaran dan melibatkan banyak pihak tersebut, maka dibutuhkan orang-orang atau aktor yang mampu membangun simpati dan merebut empati. Berbagai aktivis perempuan yang disebutkan di atas menunjukkan tentang yang mereka mampu menjadi penggerak untuk menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan elemen masyarakat lain.

Ketiga, perjuangan perempuan di Arab Saudi untuk merebut perubahan dilakukan melalui berbagai cara. Cara-cara tersebut mulai dari aksi langsung, kampanye langsung maupun via media sosial, menginisiasi petisi, menyebarluaskan video, dan lainnya. Cara-cara tersebut sejalan dengan strategi *civil society* yang disebut dengan *visibility* dan *audibility*. *Visibility* merupakan kemampuan agar apa yang diperjuangkan dapat dilihat oleh banyak orang, dan *audibility* merupakan kemampuan agar apa yang diperjuangkan dapat didengar oleh khalayak dan target sasaran (pemerintah) (Rijal & Anggraheni, 2019). Pemanfaatan media sosial Twitter, Instagram, Facebook, dan lainnya sebagai instrumen kampanye. Aksi langsung di jalan, petisi *online*, tulisan di blog, unggah video di Youtube dan lain sebagainya merupakan beberapa bentuk agar apa yang diperjuangkan perempuan Arab Saudi dapat didengar dan dilihat oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas agar simpati dan terlibat.

Perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan mengizinkan perempuan untuk mengemudi (setelah selama puluhan tahun dilarang) menunjukkan bagaimana gerakan rakyat memiliki kekuatan untuk mewujudkan perubahan. Lebih dari itu, kasus di Arab Saudi tersebut menunjukkan tentang kekuatan perempuan berjuang dalam merebut haknya sendiri. Aksi dan gerakan perempuan-perempuan Arab Saudi sejatinya dapat menjadi rujukan penting bagi aksi atau gerakan serupa di

berbagai negara, khususnya berkaitan dengan perjuangan perempuan atas hak-haknya sendiri. Dalam kaitannya dengan itu, pengalaman Arab Saudi memberikan catatan bahwa praktik aksi dan gerakan yang umumnya ditemukan di negara-negara demokrasi, nyatanya dapat berhasil di negara non-demokratis seperti Arab Saudi.

C. Penutup

Keberhasilan gerakan perempuan Arab Saudi dalam menuntut pencabutan kebijakan larangan mengemudi bagi perempuan menjadi catatan penting dalam sejarah politik Arab Saudi. Menariknya, kebijakan yang telah dijalankan sejak 1957 diklaim oleh pemerintah berdasar pada syariat Islam yang menjadi dasar negara Arab Saudi.

Akan tetapi, dalam perjalanannya, kebijakan yang disebut didasarkan pada ajaran Islam kemudian dicabut setelah tuntutan dan penolakan selama hampir tiga dekade oleh berbagai aktivis perempuan dan gerakan masyarakat. Menjadi menarik kemudian untuk mengkaji latar belakang pemerintah Arab Saudi akhirnya mencabut kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Visi Saudi 2030 setidaknya menjadi salah satu kata kunci yang membutuhkan pengkajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya penelitian lebih lanjut tentang topik ini.

Daftar Pustaka

- Agarwal, N., Lim, M., & Wigand, R. T. (2012). Online Collective Action and the Role of Social Media in Mobilizing Opinions: A Case Study on Women's Right-to-Drive Campaigns in Saudi Arabia. In C. G. Reddick & S. K. Atkin (Eds.), *Web 2.0 Technologies and Democratic Governance: Political, Policy and Management Implications*. Springer.
- Al-Rasheed, M. (2013). *A Most Masculine State: Gender, Politics and Religion in Saudi Arabia*. Cambridge University Press.
- Amnesty International. (2011). *Saudi Arabia Urged to Release Woman Arrested Following Driving Campaign*. <https://www.amnesty.org>.
- BBC. (2017). *Putra Mahkota Arab Saudi "Ingin Kerajaan Kembali" Ke Islam Moderat*. <https://www.bbc.com>.
- BBC. (2018). *"Historic Day" As Saudi Arabia Grants Women Permission to Drive*. <https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-41408690>.
- Buisson, A. A. du. (2016). *A Kingdom of Tears: Male Guardianship in Saudi Arabia*. <https://areomagazine.com>.
- Change.org. (2011). *Free Saudi Women Drivers Immediately!* <https://www.change.org/p/free-saudi-women-drivers-immediately>.
- Committee to Project Journalists. (2018). *Nouf Abdulaziz Breathing, nothing more, Was imprisoned in Saudi Arabia*. <https://cpj.org/Data/People/Nouf-Abdulaziz/Index.Php>.
- Derhally, M. A., & Khan, S. (2017). *Saudi's Mohammed bin Salman Promises Return to "Moderate Open Islam"*. <https://www.thenational.ae>.
- Farber, M. (2016). *A Saudi Prince Says It's Finally Time to Let Women Drive*. <https://time.com/4585306/saudi-arabia-prince>.
- Hausmann, R., Tyson, L. D., & Zahidi, S. (2011). *The Global Gender Gap Report 2011*. <https://www3.weforum.org>.
- Mackey, R. (2014). *Saudi Activists Call for the Release of Women Detained for Driving*. <https://www.nytimes.com>
- Memri. (2007). *Saudi Feminist Wajeha Al-Huwaidar Launches New Campaign: Let Us Drive Cars*. <https://www.memri.org>.
- Mubarak, A. Z. S. (2017). Reformasi Konstitusi dan Yudisial dalam Bingkai Konstitusionalisme di Arab Saudi. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2 (1), 1–29. <https://doi.org/10.21580>.

- Nashrullah, N. (2013, November 23). *Kenapa Muslimah Arab Saudi Dilarang Menyetir?* <https://www.Republika.Co.Id>.
- Nasr, O. (2011). *Saudi Woman Seeks Driving Acceptance on YouTube*. <http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/03/11/saudi.women.drivers/>.
- Nora Doaiji. (2017). *Saudi Women's Online Activism: One Year of the "I Am My Own Guardian" Campaign*. The Arab Gulf States Institute in Washington.
- Pen America. (2019). *Barbey Freedom to Write Award: Nouf Abdulaziz, Loujain Al-Hathloul, Eman Al-Nafjan*. <https://pen.org/2019-freedom-to-write-award/>.
- Rijal, N. K., & Anggraheni, P. (2019). Strategi Global Civil Society di Level Lokal: Kasus Earth Hour Malang. *Intermestic Journal of International Studies*, 4 (1), 28–45. <https://doi.org/10.24198>.
- Rijal, N. K., & Khoirina, R. Z. (2019). The Roles of Civil Society to Changing of Women Driving Policy In Saudi Arabia: Case Women2Drive Campaign. *Journal of Islamic World and Politics*, 3(1), 435–447. <https://doi.org/10.18196/jiwp.3125>.
- Rijal, N. K., & Widiatmojo, R. (2021). Public Awareness Campaigns Model of Global Civil Society at the Local Level: Case of Earth Hour Malang. *Jurnal Global & Strategis*, 15(2), 287–320. <https://doi.org/10.20473/jgs.15.2.2021.287-320>
- Sadek, G. (2017). *Saudi Arabia: Royal Decree Allows Women to Be Issued Driving Licenses*. <https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/saudi-arabia-royal-decree-allows-women-to-be-issued-driving-licenses/>.
- The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia. (n.d.). *Basic Law of Governance*. <https://www.Saudiembassy.Net>.
- United Nations Population Fund. (2019). *Promoting Gender Equality: Empowering Women Through Education*. <https://www.unfpa.org>.
- Usher, S. (2013). *Saudi women seek right to drive*. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24296811>.
- Zuhri, D. (2013). *Kenapa Muslimah Arab Saudi Dilarang Menyetir?* <https://www.Republika.Co.Id/Berita/Dunia>.